

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI**



RENCANA KERJA 2020



DP2KB-P3A

Jl. MT. Haryono (Jalur Dua) Luwuk
Email: [bppkb.banggai@gmail.com]

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena kasih dan karunia-Nya kami telah menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2020 dengan baik. Adapun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai tersebut, secara garis besar memuat program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang sarannya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi bidang-bidang dalam OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai agar kinerja OPD yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Luwuk 30 September 2020



dr. I Wayan Suartika, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu & capaian Renstra	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	16
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	26
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	28
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja	29
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	39
BAB V PENUTUP	43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai menyusun Dokumen Renja Tahun 2019. Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut. Dengan adanya renja ini, diharapkan peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, serta peningkatan keluarga kecil berkualitas melalui upaya pengendalian tingkat kelahiran, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja, peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dan memperkuat kelembagaan dan jenjang Pelayanan KB berjalan dengan optimal.

1.1.1 Pengertian Renja

Renja adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

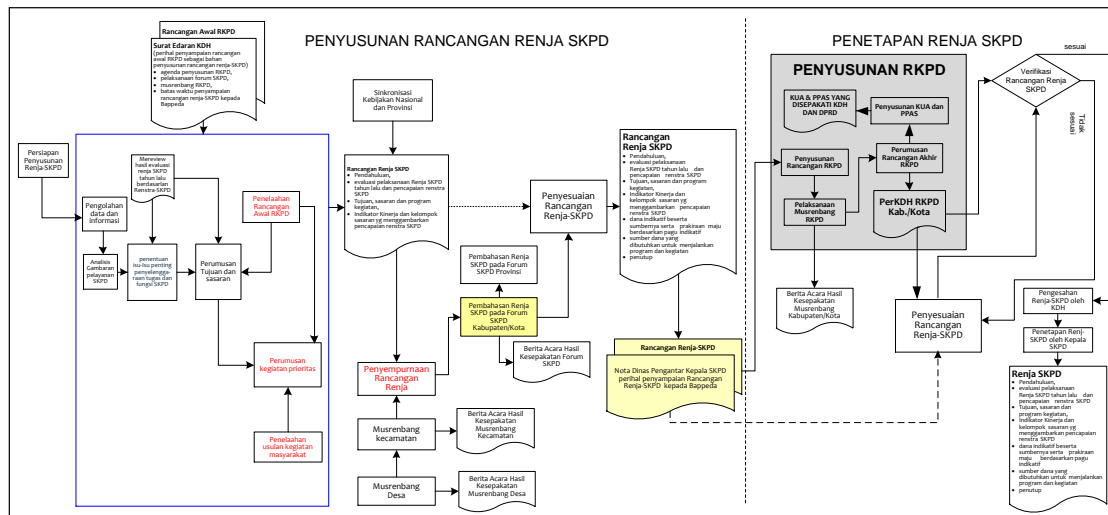
1.1.2 Proses Penyusunan Rencana Kerja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja yang disesuaikan dengan RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan

RKA setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten/Kota

Adapun proses penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahapan :

 - a. Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Renja
 - b. Orientasi mengenai Dokumen Renja
 - c. Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Dokumen Renja
 - d. Penyiapan Data dan Informasi
2. Perumusan rancangan Dokumen Renja

Tahapan :

 - a. Pengolahan data dan informasi
 - b. Analisis gambaran pelayanan
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPd
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat
 - h. Perumusan kegiatan prioritas

- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja
 - k. Pembahasan forum SKPD
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM
3. Penyajian Rancangan Renja
 4. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
 5. Penetapan Renja

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Dokumen Renja sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 – 2021.
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dalam penyusunan Dokumen Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan selanjutnya.

Sedangkan tujuannya untuk memberikan gambaran rencana program, kegiatan prioritas serta sasaran yang hendak dicapai oleh DP2KB-P3A pada tahun 2020.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdiri dari 5 (lima) bab meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu ($n-2=2018$) dan perkiraan capaian tahun berjalan ($n-1=2019$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target keluaran yang sesuai dengan Renstra tahun 2016-2021
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran KB/KS

2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019, adanya ketidaktercapaian program/kegiatan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan penyaluran Dana BOKB yaitu pada bulan juni.

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.

4. Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Beberapa kebijakan yang perlu diambil untuk faktor penyebab:

- a. Perubahan target capaian kinerja akhir periode RENSTRA
- b. Percepatan kelengkapan persyaratan penyaluran dana DAK

Untuk melihat hasil pelaksanaan renja tahun 2019 dan pencapaian renstra s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai

Saat ini kondisi kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam bidang pelayanan sudah berjalan sesuai target yang diharapkan, namun ada hal - hal yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu sarana dan prasarana pendukung, selain itu juga diklat – diklat yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pegawai sangat

diperlukan guna peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama satu periode kedepan dengan sasaran kinerja pelayanan, yakni:

- a. Terlaksananya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- b. Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
- c. Terlaksananya program KKBPK.

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel 2.2 sebagai berikut:

Dilihat dari target yang telah ditetapkan dan realisasi yang telah terlaksana dari program dan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta program dan kegiatan dari bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi dari adanya perbedaan antara jumlah yang ditargetkan dengan capaian yang diperoleh. Perbedaan tersebut di sebabkan beberapa faktor yakni :

- a. Kurangnya SDM, dalam hal ini jumlah SDM yang ada tidak memenuhi kebutuhan yang diharapkan serta minimnya pengetahuan karena kurangnya bimbingan/pelatihan yang diberikan tidak maksimal sehingga pelayanan yang diberikan pun tidak maksimal.
- b. Sarana dan prasarana yang ada kurang memadai sehingga pelayananpun kurang maksimal.
- c. Data dan informasi yang diberikan terlihat lambat tidak sesuai yang diharapkan/targetkan.
- d. Pendanaan/pembiayaan yang tersedia dinilai kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik yang bersumber dari APBD (DAU) maupun APBN (DAK) sehingga pelayanan tidak sesuai dengan yang di harapkan/targetkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam upaya menyelenggarakan tugas dan fungsi supaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui rencana strategi yang dilandasi Visi dan Misi Bupati terpilih, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DP2KB-P3A yang antara lain yakni :

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD

Menanamkan Nilai dan Norma pegawai DP2KB-P3A mengenai kesadaran disiplin dan kinerja pelayanan. Hal ini dapat dilihat dari :

- Tingkat Kehadiran, baik apel pagi dan kehadiran di kantor
- Kecepatan penyelesaian tugas setiap pegawai
- Ketepatan melaksanakan perintah tugas
- Tanggung Jawab melaksanakan tugas
- Kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kapasitas individu masih terus ditingkatkan

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD meliputi :

- a. Pelayanan PPKBD dan Sub PPKBD yang menjadi kader program KB kurang maksimal.
- b. Kerjasama lintas sektor terlihat dalam upaya – upaya pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak belum maksimal.
- c. Dukungan operasional dalam peningkatan pelayanan KB dan Pemberdayaan serta Perlindungan Perempuan dan Anak masih kurang.
- d. Akses bantuan modal bagi kelompok UPPKS yang anggota seluruhnya peserta KB sangat terbatas.
- e. Terbatasnya pelatihan – pelatihan keterampilan bagi kelompok usaha perempuan di wilayah.
- f. Penyetaraan gender dalam lingkungan kerja dan lingkungan sosial belum merata.
- g. Perlindungan terhadap KDRT belum sepenuhnya terdeteksi.
- h. Pelayanan KB di klinik KB yang masih perlu ditingkatkan.
- i. Meningkatnya kasus-kasus TRIAD (Seksualitas, HIV/AIDS, Napza).
- j. Tahapan kelompok PIK KRR yang masih lemah.
- k. Masih adanya efek samping dan komplikasi alat/obat kontrasepsi KB
- l. Pencatatan dan pelaporan di klinik KB belum maksimal.

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh DP2KBP3A dalam melaksanakan tugas dan fungsi akan berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional seperti tidak terpenuhinya target SPM.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Adanya ancaman merupakan suatu jawaban yang dijadikan tantangan untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Ancaman yang dihadapi dalam pengembangan suatu daerah diantaranya adalah :

- a. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
- b. Perdagangan orang khususnya perempuan dan anak

- c. Ketidakadilan akses ekonomi bagi perempuan meningkat
- d. Memperkerjakan anak dibawah umur meningkat
- e. Eksistensi kelembagaan PUG masih kurang
- f. Keinginan setiap keluarga terhadap jumlah anak masih tinggi (TFR)
- g. Komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKB terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran masih kurang
- h. Pengetahuan dan perilaku PUS tentang program KB dan alat kontrasepsi masih kurang
- i. Belum optimalnya peranan bidan dan petugas lapangan KB dalam konseling KB
- j. Pemakaian alat kontrasepsi dengan cara modern masih kurang
- k. Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih cukup tinggi
- l. Angka kelahiran pada perempuan usia 15-19 tahun masih tinggi
- m. Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
- n. Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko masih kurang
- o. Jumlah keluarga miskin masih cukup tinggi

Dengan tantangan yang ada maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai dinas yang memiliki kewenangan dalam hal pembinaan, perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan, anak dan keluarga. Permasalahan yang semakin kompleks dimana laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang mengakibatkan kehidupan yang layak bagi keluarga dan perlindungan terhadap anak dan perempuan semakin sulit terjangkau.

Dengan adanya ancaman tersebut merupakan peluang untuk memacu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu badan yang mengembangkan pelayanan yang ada dengan metode – metode yang menjangkau seluruh masyarakat, agar program – program yang menyentuh masyarakat miskin dengan penguatan kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran serta masyarakat memperoleh harapan – harapan dengan jumlah penduduk menurun dan perekonomian semakin meningkat.

Untuk mewujudkan harapan dimaksud dalam mencapai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dengan memanfaatkan peluang (Opportunitas) yang ada dan dapat dikembangkan secara baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun aspek peluang yang dimiliki Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai sebagai berikut:

- a. Dukungan pembiayaan oleh pusat / sentralistik (BKKBN dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
- b. Sinergitas pelayanan dengan instansi terkait (Polisi, TNI, Kesehatan, PKK, Dinas Sosial dan BPMPD)
- c. Dukungan program nasional melalui Menteri Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
- d. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
- e. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- f. Peraturan Pemerintah No. 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- g. Adanya dukungan tenaga potensial lokal / daerah

5. Formulasi isu-isu penting dan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

a. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Jumlah kelompok usaha perempuan masih rendah dan tidak aktif
- 2) Angka kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi
- 3) Kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
- 4) Penguatan kelembagaan pengrusutamaan gender masih lemah / kurang
- 5) Jumlah penanganan dan pelayanan bagi anak-anak terlantar, putus sekolah dan trafficking masih kurang

b. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- 1) Penggunaan alat kontrasepsi / Contraceptive Prevaluasi Rate (CPR) masih terbatas
- 2) Unmet Need masih tinggi, hal ini disebabkan kelompok sasaran masih berada di galcitas yang belum tersentuh karena adat istiadat
- 3) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terutama bagi pria masih cukup kurang
- 4) Child Woman Ratio (CWR) masih cukup tinggi
- 5) Presentase Keluarga Pra Sejahtera (KPS) KS I (Keluarga Miskin) terhadap jumlah keluarga relatif masih tinggi
- 6) Jumlah lembaga relatif kurang
- 7) Kepadatan penduduk relatif tinggi
- 8) Jumlah Catur Bina (BKB, BKR, BKL, UPPKS) masih kurang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Landasan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Visi yang diemban oleh RPJMD 2016-2021 ini adalah untuk Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya.

Dalam RKPD Tahun 2020 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD dan tentunya menyesuaikan prioritas program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai, seperti tersaji dalam Tabel 2.5.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Banggai. Sejalan dengan Visi Kabupaten Banggai yaitu “*Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya*”, dimana upaya untuk mewujudkan keberhasilan Visi tersebut tentunya juga ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kabupaten Banggai.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai menginginkan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan baik, berdaya dan berhasil guna. Hal tersebut memerlukan dukungan dari kelembagaan perangkat daerah agar efektif dan efisien sehingga dapat terwujud pelayanan prima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Banggai yaitu dalam misi keenam meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah, maka Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

***“Pengendalian Penduduk untuk Mencapai Keluarga Kecil Bahagia,
Sejahtera, Mandiri dan Berkesetaraan Gender”.***

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- a. Meningkatkan tata kelola administrasi kantor yang efektif dan efisien
- b. Meningkatkan peran dan sumber daya perempuan dalam pembangunan
- c. Mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak
- d. Mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan keluarga berencana
- e. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencapai keluarga kecil bahagia, sejahtera dan mandiri.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DP2KB-P3A

Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan visi. Visi adalah suatu gambaran

menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi. Visi dan misi Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai 2016-2021 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai tahun 2016-2021

Berpedoman pada visi Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu :

**“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai
Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman
Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”**

Mengacu pada visi tersebut, kemudian ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Banggai tahun 2016-2021 sebagai bentuk upaya mencapai visi yaitu :

1. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa
2. Mengembangkan pertanian melalui pemanfaatan teknologi
3. Mengembangkan sektor kemaritiman berbasis potensi wilayah
4. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan merata
5. Mewujudkan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dan agama
6. Meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah

Sebagai salah satu OPD di Kabupaten Banggai, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut memiliki peran untuk dapat mewujudkan visi dan misi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tepat untuk mengetahui dan mengidentifikasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna terbentuknya arah kebijakan pembangunan OPD.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan visi misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Banggai, misi keenam dari urutan misi tersebut “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah” yaitu tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

3.2.1 Tujuan Renja

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi .

Adapun harapan / tujuan yang hendak dicapai dalam periode 1 tahun kedepan yakni :

1. Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur.

Adapun sasaran Renja sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

3.3 Program dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Renja 2019 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Banggai, meningkatkan sumber daya manusia dan daya saing daerah.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2020:

Jumlah Program	: 16
Jumlah Kegiatan	: 42
Pagu Indikatif APBD	: Rp 10.830.801.205,-

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai di Tahun 2020 adalah :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan makanan dan minuman

- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
- j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- k. Penyediaan jasa administrasi perkantoran

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

III. Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS

- a. Pemulangan pegawai yang pensiun

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan pemantauan kerja aparatur

V. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

- a. Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

VI. Program Pengembangan Sistem informasi / data

Kegiatan :

- a. Penyusunan profil perangkat daerah
- b. Pemutakhiran data kepegawaian

VII. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan :

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

VIII. Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- b. Fasilitas Pembentukan / pembinaan Kota Layak Anak dan forum anak daerah

IX. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

- a. Fasilitas pembentukan kelembagaan PUG dan PP

X.Program Peningkatan Kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Kegiatan :

- a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

XI.Program Peningkatan Peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan

Kegiatan :

- a. Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG
- b. Fasilitasi perempuan dalam pembangunan

XII.Program Keluarga Berencana

Kegiatan :

- a. Pelayanan KIE
- b. Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan stock Opname Alokon
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS

XIII.Program Kesehatan Produksi Remaja

Kegiatan :

- a. Pembinaan PIK KRR

XIV.Program pelayanan kontrasepsi

Kegiatan :

- a. Pelayanan TKBK Kabupaten – Kecamatan

XV.Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB / KR yang mandiri

Kegiatan :

- a. Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB
- b. Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB

XVI.Program Keluarga Sejahtera

Kegiatan :

- a. Peaksanaan HARGANAS
- b. Pembinaan kelompok UPPKS
- c. Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB,BKR,BKL)
- d. Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian lomba PKB dan IMP
- e. Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga

Uraian rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai merupakan program yang tercantum pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, DAK). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1,814,141,805
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 4,800,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 235,700,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp 14,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 31,000,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 137,318,000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	28,400,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	12,500,000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	18,160,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp	120,000,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rp	84,503,805
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Rp	1,127,760,000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	90,180,200
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp	11,500,000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp	37,500,200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	37,500,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp	1,680,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp	2,000,000

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Rp	15,000,000
Pemulangan pegawai yang pensiun	Rp	15,000,000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	5.013.800
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Rp	5.013.800
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	160,758,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp	7.280.000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Rp	48,078,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Rp	105,400,000
Pengembangan Sistem Informasi / Data	Rp	33,125,000
Penyusunan Profil SKPD	Rp	5,525,000
Pemutakhiran data kepegawaian	Rp	27,600,000
Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Rp	91,582,900
Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Rp	91,582,900
Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp	254,860,500
Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Rp	46,701,500
Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah	Rp	208,159,000
Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak	Rp	24,295,000
Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP	Rp	24,295,000
Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Rp	20,500,000
Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Rp	20,500,000
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp	150,132,500

Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG	Rp	33,757,500
Fasilitasi perempuan dalam pembangunan	Rp	116,375,000
Keluarga Berencana	Rp	2,426,217,000
Pelayanan KIE	Rp	153,787,000
Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	Rp	23,400,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)	Rp	2,249,030,000
Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp	59,198,000
Pembinaan PIK KRR	Rp	59,198,000
Pelayanan Kontrasepsi	Rp	72,178,000
Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	Rp	72,178,000
Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Rp	54,608,000
Fasiilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Rp	17,080,000
Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Rp	37,528,000
Keluarga Sejahtera	Rp	5,558,510,500
Pelaksanaan HARGANAS		Rp 110,078,000
Pembinaan Kelompok UPPKS	Rp	25,402,000
Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)		Rp 614,953,000
Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP		Rp 4,653,104,000
Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga	Rp	154,973,500
Total	Rp	10,830,801,205

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. RKPD Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banggai Tahun 2005-2025 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dengan demikian ada keselarasan antara tema dan prioritas kabupaten dengan tema dan nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banggai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2020.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis


Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA DP2KBP3A) TAHUN 2016 - 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3) 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN (N-1) 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA TAHUN (N-2) 2018	REALISASI RENJA TAHUN (N-2) 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-1) 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	3290 Lembar	750 Lembar	440 Lembar	440 Lembar	1.00%	333 Lembar	1523 Lembar	0.46%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	36 Rek	6 Rek	6 Rek	6 Rek	1.00%	4 Rek	16 rek	0.44%
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan	20 Unit	0	0	0	1.00%	5 unit	5 Unit	0.25%
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor	12 Org, 60 Jenis, 42 Jenis	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	1.00%	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	6 Org, 30 jenis, 21 jenis	0.50%
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	165 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	45 Jenis	1.00%	45 jenis	135 jenis	0.81%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan	24 Jenis, 273000 lembar	4 Jenis, 52750 lembar	4 Jenis, 20000 lembar	4 Jenis, 20000 lembar	1.00%	4 Jenis, 16250 lembar	12 jenis,	0.50%
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan	66 komponen dan 23 BP	11 komponen dan 8 BP	11 komponen dan 4 BP	11 komponen dan 4 BP	1.00%	11 komponen dan 4 BP	33 komponen dan 16 BP	0.50%
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	3696 dos	641 dos	571 dos	571 dos	1.00%	375 dos	1587 dos	0.42%
18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	291 kali	42 kali	42 kali	42 kali	1.00%	131 kali	215 kali	0.73%
19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	180 kali	25 kali	25 kali	25 kali	1.00%	383 kali	181 kali	1.00%
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran	142 orang	39 Orang	20 Orang	20 Orang	1.00%	32 Orang	91 orang	0.64%
02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
3	Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gudang kantor dan rumah singgah korban kekerasan yang dibangun	2 Unit	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang diadakan	27 Unit	2 Unit	0	0	0.00%	0	2 unit	0.07%
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	49 Unit	13 Unit	2 Unit	2 Unit	1.00%	4 Unit	19 unit	0.38%
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	85 Unit	15 Unit	4 Unit	4 Unit	1.00%	0	19 unit	0.22%
11	Pengadaan bangunan / berkala prasarana pelengkap gedung kantor	Jumlah pagar balai penyuluhan yang dibangun	12 unit	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	18 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1.00%	5 Unit	11 unit	0.61%
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	41 Unit	8 Unit	2 Unit	2 Unit	1.00%	5 Unit	15 unit	0.36%

		28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	59 Unit	8 Unit	4 Unit	4 Unit	1.00%	6 Unit	18 unit	0.30%
		42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	3 Unit	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
	03		Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	tingkat kepatuhan disiplin ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		1	Kegiatan : Pengadaan mesin kartu absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi	1 Unit	1 Unit	0	0	0.00%	0	1 unit	1.00%
		5	Pengadaan Pakaian khusus hari - hari tertentu	Jumlah pakaian olahraga, batik dan pakaian dinas harian	905 Pasang	80 Pasang	165 pasang	165 pasang	1.00%	0	245 pasang	0.27%
	04		Program : Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	2%
		1	Kegiatan : Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	10 Orang	0	3 Orang	3 Orang	1.00%	2 Orang	5 orang	0.50%
	05		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		1	Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	48 Kali	6 kali	0	0	0.00%	0	6 kali	0.12%
		4	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	11 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1.00%	1 Dok	3 dok	0.27%
		42	Pertemuan dan Pembinaan Kepegawaian	Jumlah peserta pertemuan dan pembinaan kepegawaian	50 Orang	50 Orang	0	0	0.00%	0	50 orang	1.00%
	06		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		1	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP	78 Dok	13 Dok	13 dok	13 dok	1.00%	2 dok	28 dok	0.35%
		4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	96 Laporan	16 Lap	16 lap	16 lap	1.00%	1 lap	33 lap	0.34%
		5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA	26 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	1.00%	5 Dok	15 dok	0.57%
	07		Program : Pengembangan Sistem Informasi / Data	Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah	100%	0	0	0	0%	100	100%	1%
		3	Kegiatan : Penyusunan Profil SKPD	Jumlah buku profil	3 Dok	0	0	0	0.00%	1 profil	1 profil	0.33%
		5	Pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian	3 Dok	0	0	0	0.00%	1 dok	1 dok	0.33%
	08		Program : Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		2	Kegiatan : Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan	28 Dok	1 lap	5 dok	5 dok	1.00%	5 dok	11 dok	0.39%
	15		Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
		5	Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	1000 Org	200 Org	200 Org	200 Org	1.00%	75 Org	475 org	0.47%
		6	Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah	Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten	29 Forum	2 Forum	2 Forum	2 Forum	1.00%	2 Forum	6 forum	0.20%
	16		Program : Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak	Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi	14 Kel	14 kel	14 kel	14 kel	14 kel	14 kel	42 kel	3%
		10	Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP	Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi	18 Kel	3 Klmpk	2 Klmpk	2 Klmpk	1.00%	1 Klmpk	6 kel	0.33%
	17		Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	33%
		8	Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan	180 Org	24 Org	24 Org	24 Org	1.00%	12 Org	60 org	0.33%
	18		Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		7	Kegiatan : Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	64 Kel	10 Klmpk	12 Klmpk	12 Klmpk	1.00%	10 Klmpk	32 kel	0.50%

		8	Fasilitasi perempuan dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	105 Kel	15 Klmpk	10 Klmpk	10 Klmpk	1.00%	10 Klmpk	35 kel	0.33%
2	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
		15	Program : Keluarga Berencana	Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		2	Kegiatan : Pelayanan KIE	Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film,	77 Kec	8 Kec	10 Kec	10 Kec	1.00%	23 Kec	23 kec	0.29%
		7	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	Jumlah Faskes KB yang di monitoring	1344 faskes	224 Faskes	224 Faskes	224 Faskes	1.00%	5 Faskes	224 faskes	0.16%
		8	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana KB/KS	103 jenis	12 jenis	11 jenis	11 jenis	1.00%	20 jenis	43 jenis	0.41%
		16	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase kelompok PIK KRR yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		3	Kegiatan : Pembinaan PIK KRR	Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan	745 Org	115 Org	125 Org	125 Org	1.00%	100 Org	340 org	0.45%
		17	Program : Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB baru	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		5	Kegiatan : Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK	138 Kec	23 Kec	23 Kec	23 Kec	1.00%	4 Kec	23 kec	0.16%
		18	Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan peserta KB aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		1	Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Desa yang difasilitasi	2022 Desa	337 desa/kel	337 desa/kel	337 desa/kel	1.00%	1 desa/kel	337 desa/kel	0.16%
		2	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Jumlah masyarakat yang diayahi menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Masyarakat KB Kes	3250 Org	600 Org	300 Org	300 Org	1.00%	300 Org	1200 orang	0.36%
		25	Program : Keluarga Sejahtera	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	3%
		1	Kegiatan : Pelaksanaan HARGANAS	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	30 Kel	5 Klmpk	5 Klmpk	5 Klmpk	1.00%	5 Klmpk	15 kel	0.50%
		2	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	22 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1.00%	4 Kali	12 kali	0.54%
		3	Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL	15 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	1.00%	2 Kali	6 kali	0.40%
		4	Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	550 Org	100 Org	0	0	0.00%	550 Org	650 orang	1.18%
		5	Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga	Jumlah Profil KKBPK yang dibuat	3 Profil	0	0	0	0.00%	1 Profil	1 profil	0.33%

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

**Tabel 2.2 Sebelum Perubahan
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proy
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Pengendalian angka kelahiran (Laju Pertumbuhan Penduduk)	-	1.50	2.25	1.82	1.49	1.45	1.40	1.45	1.46	
2	Jumlah Rata-rata Anak yang dimiliki oleh WUS (TFR)	-	2.4	3.02	2.80	2.75	2.40	2.30	2	2.1	
3	Indeks Pembangunan Gender	-	95	91	91.5	92	92.5	93	87	89	

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

eksi	Catatan Analisis
Tahun 2020	
13	14

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Banggai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	71.74	-	73.06	74.50	76.95	79.55	81.76	-	-	76.95	79.55	
2	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih	100	-	38.20	39.30	40.55	41.79	42.50	-	-	40.55	41.79	
3	Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR)	2.31	-	3.02	2.80	2.75	2.40	2.30	-	-	2.75	2.40	

Kepala Dinas



dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Banggai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	8	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Pelayanan Administrasi Perkantoran		tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100%	1,196,800,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran		tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100%	1,814,141,805	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luwuk	Jumlah materai	500 Lembar	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Luwuk	Jumlah materai	800 Lembar	4,800,000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luwuk	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Rek	73,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Luwuk	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rek	235,700,000	
06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Luwuk	jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan	5 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Luwuk	jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan	5 Unit	14,000,000	
08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luwuk	Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	35,500,000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Luwuk	Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	31,000,000	
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Luwuk	Jumlah alat tulis kantor	10 Jenis	15,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Luwuk	Jumlah alat tulis kantor	15 Jenis	137,318,000	
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luwuk	Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan	4 Jenis, 71.000 lembar	6,500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Luwuk	Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan	4 Jenis, 71.000 lembar	28,400,000	
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luwuk	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan	11 komponen dan 4 BP	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Luwuk	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan	11 komponen dan 5 BP	12,500,000	
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Luwuk	Jumlah makanan dan minuman rapat	400 dos	11,000,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Luwuk	Jumlah makanan dan minuman rapat	454 dos	18,160,000	
18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	30 kali	250,000,000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	12 kali	120,000,000	
19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	35 kali	150,000,000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	100 kali	84,503,805	
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Luwuk	Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran	30 orang	622,800,000	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Luwuk	Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran	82 orang	1,127,760,000	
02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	245,520,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	90,180,200	
03	Pembangunan gedung kantor	Luwuk	Jumlah rumah singgah korban kekerasan yang dibangun	0%	-	Pembangunan gedung kantor	Luwuk	Jumlah rumah singgah korban kekerasan yang dibangun	0%	-	
04	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Luwuk	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	5 Unit	100,000,000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Luwuk	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	0%	-	
07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	3 Unit	50,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	11,500,000	
09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	3 Unit	50,000,000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Luwuk	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Unit	37,500,200	
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Kec	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	5 Unit	40,000,000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	2 Kec	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	5 Unit	37,500,000	
24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	2,520,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Luwuk	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	1,680,000	

26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Luwuk	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	6 Unit	3,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Luwuk	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	2,000,000	
03	Program Peningkatan disiplin aparatur		Tingkat kepatuhan disiplin ASN	100%	100,000,000	Program Peningkatan disiplin aparatur		Tingkat kepatuhan disiplin ASN	0	0	
05	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Luwuk	Jumlah pakaian olahraga dan batik	2 jenis	100,000,000	Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Luwuk	Jumlah pakaian olahraga dan batik	0	0	
04	Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS		Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	10,500,000	Program fasilitasi pindah / purna tugas PNS		Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	15,500,000	
01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Luwuk	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	3 Orang	10,500,000	Pemulangan pegawai yang pensiun	Luwuk	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	3 Orang	15,500,000	
05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	45,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	5,013,800	
01	Pendidikan dan pelatihan formal	Luwuk	Jumlah perjalanan dinas dan biaya kepesertaan / kontribusi	100%	30,000,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Luwuk	Jumlah perjalanan dinas dan biaya kepesertaan / kontribusi	0%	-	
04	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Luwuk	Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	1 Dok	15,000,000	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Luwuk	Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	3 Dok	5,013,800	
06	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	58,377,808	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	160,758,000	
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Luwuk	Jumlah dokumen LKJIP	2 Dok	10,000,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Luwuk	Jumlah dokumen LKJIP	3 Dok	7,280,000	
04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Luwuk	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	1 laporan	8,000,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Luwuk	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	1 laporan	48,078,000	
05	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Luwuk	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA	5 Dok	40,377,808	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Luwuk	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA	7 Dok	105,400,000	
07	Pengembangan Sistem Informasi / Data		Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah	100%	20,000,000	Pengembangan Sistem Informasi / Data		Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah	100%	33,125,000	
03	Penyusunan Profil SKPD	Luwuk	Jumlah buku profil	1 Dok	5,000,000	Penyusunan Profil SKPD	Luwuk	Jumlah buku profil	1 Dok	5,525,000	
05	Pemutakhiran data kepegawaian	Luwuk	Jumlah dokumen data kepegawaian	1 Dok	15,000,000	Pemutakhiran data kepegawaian	Luwuk	Jumlah dokumen data kepegawaian	1 Dok	27,600,000	
08	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan	100%	70,373,192	Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan		Persentase capaian pelaksanaan kegiatan	100%	91,582,900	
02	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Kab. Banggai	Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan	1 Dok	70,373,192	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Kab. Banggai	Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan	2 Dok	91,582,900	
15	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan	100%	130,000,000	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan	100%	254,860,500	
05	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Kab. Banggai	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	200 Org	30,000,000	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Kab. Banggai	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	50 Org	46,701,500	
06	Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah	Kab. Banggai	Jumlah Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak yang dibentuk dan dibina	2 Forum	100,000,000	Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah	Kab. Banggai	Jumlah Forum Anak Daerah dan Kota Layak Anak yang dibentuk dan dibina	2 Forum	208,159,000	
16	Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak		Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi	14 Kel	12,389,000	Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak		Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi	14 Kel	24,295,000	

10	Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP	Kab. Banggai	Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi	2 Kel	12,389,000	Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP	Kab. Banggai	Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi	1 Kel	24,295,000	
17	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan		Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan	100%	47,000,000	Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan		Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan	100%	20,500,000	
08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab. Banggai	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan	24 Org	47,000,000	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Kab. Banggai	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan	6 Org	20,500,000	
18	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender	100%	135,000,000	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender	100%	150,132,500	
07	Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG	Kab. Banggai	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	14 Kel	25,000,000	Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG	Kab. Banggai	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	1 Kel	33,757,500	
08	Fasilitasi perempuan dalam pembangunan	Kab. Banggai	Jumlah Kelompok Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	15 Kel	110,000,000	Fasilitasi perempuan dalam pembangunan	Kab. Banggai	Jumlah Kelompok Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	15 Kel	116,375,000	
15	Keluarga Berencana		Persentase penyebarluasan KIE	100%	8,572,040,000	Keluarga Berencana		Persentase penyebarluasan KIE	100%	2,426,217,000	
02	Pelayanan KIE	Kab. Banggai	Jumlah kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak dan Media Penyiaran Radio	5 Kec	30,000,000	Pelayanan KIE	Kab. Banggai	Jumlah kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak dan Media Penyiaran Radio	23 Kec	153,787,000	
07	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	Kab. Banggai	Jumlah Faskes KB yang di monitoring	5 faskes	5,000,000	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	Kab. Banggai	Jumlah Faskes KB yang di monitoring	29 faskes	23,400,000	
08	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)	Kab. Banggai	Jumlah sarana dan prasarana KB/KS	20 jenis	8,537,040,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)	Kab. Banggai	Jumlah sarana dan prasarana KB/KS	20 jenis	2,249,030,000	
16	Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase kelompok PIK KRR yang aktif	100%	30,000,000	Kesehatan Reproduksi Remaja		Persentase kelompok PIK KRR yang aktif	100%	59,198,000	
03	Pembinaan PIK KRR	Kab. Banggai	Jumlah Pengurus Kelompok PIK - KRR yang mendapatkan Pembinaan	100 Org	30,000,000	Pembinaan PIK KRR	Kab. Banggai	Jumlah Pengurus Kelompok PIK - KRR yang mendapatkan Pembinaan	100 Org	59,198,000	
17	Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi		Cakupan peserta KB baru	100%	80,000,000	Peningkatan Pelayanan Kontrasepsi		Cakupan peserta KB baru	100%	72,178,000	
05	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	Kab. Banggai	Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan TKBK	4 Kec	80,000,000	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan		Jumlah kecamatan yang mendapat pelayanan TKBK	100%	72,178,000	
18	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		Cakupan peserta KB aktif	3 desa/kel	75,000,000	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri		Cakupan peserta KB aktif	1 desa/kel	54,608,000	
01	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Kab. Banggai	Jumlah desa	200 Org	25,000,000	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Kab. Banggai	Jumlah desa	150 Org	17,080,000	
02	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Kab. Banggai	Jumlah Masyarakat yang dilayani menjadi Akseptor KB pada kegiatan Roadshow	100%	50,000,000	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Kab. Banggai	Jumlah Masyarakat yang dilayani menjadi Akseptor KB pada kegiatan Roadshow	100%	37,528,000	
25	Keluarga Sejahtera		Persentase peningkatan tahapan keluarga sehatera	5 Kel	172,000,000	Keluarga Sejahtera		Persentase peningkatan tahapan keluarga sehatera	4 Kel	5,558,510,500	
01	Pelaksanaan HARGANAS	Kab. Banggai	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kader, Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	4 Kali	60,000,000	Pelaksanaan HARGANAS	Kab. Banggai	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kader, Kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	1 Kali	110,078,000	
02	Pembinaan Kelompok UPPKS	Kab. Banggai	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	3 Kali	20,000,000	Pembinaan Kelompok UPPKS	Kab. Banggai	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	1 Kali	25,402,000	
03	Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)	Kab. Banggai	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL	100 Org	20,000,000	Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)	Kab. Banggai	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL	700 Org	614,953,000	
04	Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP	Kab. Banggai	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	1 Profil	35,000,000	Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP	Kab. Banggai	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	1 Profil	4,653,104,000	

05	Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga	Kab. Banggai	Jumlah profil	1 Profil	37,000,000	Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga	Kab. Banggai	Jumlah profil	1 Profil	154,973,500
T o t a l					11,000,000,000					10,830,801,205



Kepala Dinas

dr. IWAYAN SUARTIKA, ME
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19641002 199003 1 006

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Banggai

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran	Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7
A	PIK			130,500,000		
1	Pembinaan Kelompok BKR dan Lansia (PIK)	Kelurahan Karaton Kec. Luwuk		20,000,000	1 Paket	
2	Bantuan peralatan kue (PIK)	Desa Trans Mayayap Kec. Bualemo	Tersedianya peralatan pembuatan kue bagi ibu di desa	12,500,000	1 Kelompok	
3	Pelatihan kelompok perempuan (PIK)	Desa Toiba Kec. Bualemo	adanya pelatihan kelompok perempuan sebagai upaya pemberdayaan	6,000,000	1 Paket	
4	Pemberdayaan kelompok wanita di desa (PIK)	Desa Longkoga Barat Kec. Bualemo	Pemberdayaan kelompok wanita di desa	4,500,000	1 Paket	
5	Pelatihan keterampilan untuk kelompok wanita (PIK)	Desa Bualemo B Kec. Bualemo	Adanya pelatihan dan bimbingan bagi kelompok wanita di desa	12,500,000	1 Paket	
6	Pengadaan bantuan PKK desa malik untuk pembuatan kue (PIK)	Desa Malik Kec. Bualemo	Pengadaan bantuan PKK desa malik	12,500,000	1 Paket	
7	Pelatihan keterampilan untuk kelompok wanita (PIK)	Desa Binsil K Kec. Bualemo	Adanya pembinaan dan pelatihan sebagai upaya pemberdayaan bagi kelompok wanita	12,500,000	1 Paket	
8	Pelatihan keterampilan untuk kelompok wanita (PIK)	Desa Lembah Tompotika Kec. Bualemo	Adanya pembinaan dan pelatihan sebagai upaya pemberdayaan bagi kelompok wanita	12,500,000	1 Paket	
9	Pengadaan alat pembuat keripik pisang (PIK)	Desa Mayayap Kec. Bualemo	Tersedianya alat pembuat keripik pisang	12,500,000	1 Kelompok	
10	Pelatihan keterampilan perempuan (PIK)	Desa Nipakalemoan Kec. Bualemo	Adanya pelatihan dan bimbingan terhadap kelompok perempuan	12,500,000	1 Kelompok	
11	Bantuan Bantuan mesin pengolah pisang dan ubi untuk kelompok perempuan (PIK)	Desa Lembah Makmur Kec. Bualemo	Tersedianya bantuan untuk kelompok perempuan	12,500,000	1 Paket	
B	Musrenbang			118,000,000		
1	Pembinaan Anak Sekolah dan Penyediaan Fasilitas (PAUD BKB KIT)	Ds. Pangkalaseang Baru, Kec. Balantak Utara	Peningkatan kualitas siswa	10,000,000	1 Paket	
2	Bantuan Pelatihan dan alat Membuat untuk Kelompok Perempuan	Desa Padungnyo, Kec. Nambo	Pelatihan dan alat	108,000,000	1 Paket	

Kepala Dinas

dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641002 199003 1 006

TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100%	Rp 1,814,141,805	DAU/DAK		100%	Rp 1,116,200,000
	1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	Luwuk	800 Lembar	Rp 4,800,000	DAU	700 Lembar	Rp 4,200,000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Luwuk	4 Rek	Rp 235,700,000	DAU	4 Rek	Rp 77,500,000
	6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan	Luwuk	5 Unit	Rp 14,000,000	DAU	5 Unit	Rp 20,000,000
	8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor	Luwuk	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	Rp 31,000,000	DAU	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	Rp 37,000,000
	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	Luwuk	15 Jenis	Rp 137,318,000	DAU	10 Jenis	Rp 15,000,000
	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan	Luwuk	4 Jenis, 71.000 lembar	Rp 28,400,000	DAU	4 Jenis, 55.000 lembar	Rp 27,500,000
	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan	Luwuk	11 komponen dan 5 BP	Rp 12,500,000	DAU	11 komponen dan 3 BP	Rp 10,000,000
	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	Luwuk	454 dos	Rp 18,160,000	DAU	500 dos	Rp 20,000,000
	18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	Luar daerah	12 kali	Rp 120,000,000	DAU	12 kali	Rp 120,000,000
	19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	Dalam daerah	100 kali	Rp 84,503,805	DAU	100 kali	Rp 85,000,000
	20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Luwuk	82 orang	Rp 1,127,760,000	DAU/DAK	30 orang	Rp 700,000,000
	02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	Rp 90,180,200	DAU		100%	Rp 1,042,100,000
	3	Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	Jumlah rumah singgah korban kekerasan yang dibangun	Luwuk	0%	Rp -	-	1 Unit	Rp 337,100,000
	4	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan	Luwuk	0%	Rp -	-	1 Unit	Rp 550,000,000
	7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Luwuk	2 Unit	Rp 11,500,000	DAU	5 Unit	Rp 30,000,000
	9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	Luwuk	1 Unit	Rp 37,500,200	DAU	10 Unit	Rp 30,000,000
	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Luwuk	5 Unit	Rp 37,500,000	DAU	10 Unit	Rp 40,000,000
	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Luwuk	4 Unit	Rp 1,680,000	DAU	3 Unit	Rp 45,000,000
	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Luwuk	4 Unit	Rp 2,000,000	DAU	5 Unit	Rp 10,000,000
	04	Program : Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 15,500,000	DAU		100%	Rp 15,500,000

		1	Kegiatan : Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	Luwuk	3 Orang	Rp 15,500,000	DAU		3 Orang	Rp 15,500,000
	05		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian		100%	Rp 5,013,800	DAU		100%	Rp 20,000,000
		4	Kegiatan : Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	Luwuk	3 Dok	Rp 5,013,800	DAU		1 dok	Rp 20,000,000
	06		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan		100%	Rp 160,758,000	DAU		100%	Rp 100,000,000
		1	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJiP	Luwuk	3 Dok	Rp 7,280,000	DAU		1 Dok	Rp 20,000,000
		4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	Luwuk	1 laporan	Rp 48,078,000	DAU		1 laporan	Rp 40,000,000
		5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA	Luwuk	7 Dok	Rp 105,400,000	DAU		5 Dok	Rp 40,000,000
	07		Program : Pengembangan Sistem Informasi / Data	Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah		100%	Rp 33,125,000	DAU		100%	Rp 48,000,000
		3	Kegiatan : Penyusunan Profil SKPD	Jumlah buku profil	Luwuk	1 Dok	Rp 5,525,000	DAU		1 Dok	Rp 20,000,000
		5	Pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian	Luwuk	1 Dok	Rp 27,600,000	DAU		1 Dok	Rp 28,000,000
	08		Program : Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan		100%	Rp 91,582,900	DAU/DAK		100%	Rp 155,000,000
		2	Kegiatan : Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan	Kab. Banggai	2 Dok	Rp 91,582,900	DAU/DAK		4 Dok	Rp 155,000,000
	15		Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan		100%	Rp 254,860,500	DAU		100%	Rp 160,000,000
		5	Kegiatan : Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Kab. Banggai	50 Org	Rp 46,701,500	DAU		200 Org	Rp 40,000,000
		6	Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah	Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten	Kab. Banggai	2 Forum	Rp 208,159,000	DAU		2 Forum	Rp 120,000,000
	16		Program : Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak	Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi		14 Kel	Rp 24,295,000	DAU		14 Kel	Rp 25,000,000
		10	Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan pp	Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi	Kab. Banggai	1 Kel	Rp 24,295,000	DAU		2 Kel	Rp 25,000,000
	17		Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan		100%	Rp 20,500,000	DAU		100%	Rp 30,000,000
		8	Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan	Kab. Banggai	6 Org	Rp 20,500,000	DAU		24 Org	Rp 30,000,000
	18		Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender		100%	Rp 150,132,500	DAU		100%	Rp 125,000,000
		7	Kegiatan : Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	Kab. Banggai	1 Kel	Rp 33,757,500	DAU		14 Kel	Rp 35,000,000
		8	Fasilitasi perempuan dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	Kab. Banggai	15 Kel	Rp 116,375,000	DAU		15 Kel	Rp 90,000,000
2	08		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
	15		Program : Keluarga Berencana	Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai		100%	Rp 2,426,217,000	DAU/DAK		100%	Rp 9,392,225,200

		2	Kegiatan : Pelayanan KIE	Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya	Kab. Banggai	23 Kec	Rp 153,787,000	DAU/DAK		12 Kec	Rp 80,000,000
		7	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	Jumlah Faskes KB yang di monitoring	Kab. Banggai	29 faskes	Rp 23,400,000	DAU		30 faskes	Rp 25,000,000
		8	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana KB/KS	Kab. Banggai	20 jenis	Rp 2,249,030,000	DAK/DAU		20 jenis	Rp 9,287,225,200
		16	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase kelompok PIK KRR yang aktif		100%	Rp 59,198,000	DAU		100%	Rp 94,000,000
		3	Kegiatan : Pembinaan PIK KRR	Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan	Kab. Banggai	100 Org	Rp 59,198,000	DAU		135 Org	Rp 94,000,000
		17	Program : Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB baru		100%	Rp 72,178,000	DAU		100%	Rp 100,000,000
		5	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK	Kab. Banggai	9 Kec	Rp 72,178,000	DAU		23 Kec	Rp 100,000,000
		18	Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan peserta KB aktif		100%	Rp 54,608,000	DAU		100%	Rp 55,000,000
		1	Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Desa yang difasilitasi	Kab. Banggai	1 desa/kel	Rp 17,080,000	DAU		1 desa/kel	Rp 18,000,000
		2	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes	Kab. Banggai	150 Org	Rp 37,528,000	DAU		800 Org	Rp 37,000,000
		25	Program : Keluarga Sejahtera	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera		100%	Rp 5,558,510,500	DAU/DAK		100%	Rp 306,000,000
		1	Kegiatan : Pelaksanaan HARGANAS	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	Kab. Banggai	4 Kel	Rp 110,078,000	DAU		5 Kel	Rp 75,000,000
		2	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	Kab. Banggai	1 Kali	Rp 25,402,000	DAU		4 Kali	Rp 26,000,000
		3	Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL	Kab. Banggai	1 Kali	Rp 614,953,000	DAU/DAK		3 Kali	Rp 25,000,000
		4	Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	Kab. Banggai	700 Org	Rp 4,653,104,000	DAU/DAK		100 Org	Rp 150,000,000
		5	Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga	Jumlah Profil KKBPK yang dibuat	Kab. Banggai	1 Profil	Rp 154,973,500	DAU/DAK		1 Profil	Rp 30,000,000
T o t a l							Rp 10,830,801,205				Rp 12,784,025,200

Kepala Dinas


dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641002 199003 1 006

TABEL. 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DP2KB-P3A KAB. BANGGAI

KODE	PROGRAM & KEGIATAN	SASARAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU
1	2	3	4	5
01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran	100%	Rp 1,814,141,805
1	Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	800 Lembar	Rp 4,800,000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	4 Rek	Rp 235,700,000
6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan	5 Unit	Rp 14,000,000
8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa petugas kebersihan , jumlah jenis bahan kebersihan kantor	2 Org, 10 Jenis, 7 Jenis	Rp 31,000,000
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor	15 Jenis	Rp 137,318,000
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan	4 Jenis, 71.000 Lembar	Rp 28,400,000
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan jaringan listrik yang digunakan	11 komponen dan 5 BP	Rp 12,500,000
17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman rapat	454 dos	Rp 18,160,000
18	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	12 kali	Rp 120,000,000
19	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	100 kali	Rp 84,503,805
20	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis dan administrasi perkantoran	82 orang	Rp 1,127,760,000
02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100%	Rp 90,180,200
7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	Rp 11,500,000
9	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan Gedung Kantor yang diadakan	1 Unit	Rp 37,500,200
24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	5 Unit	Rp 37,500,000
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	Rp 1,680,000
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Unit	Rp 2,000,000
04	Program : Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 15,500,000
1	Kegiatan : Pemulangan pegawai yang pensiun	Persentase usulan purna tugas ASN yang diajukan tepat waktu	3 Orang	Rp 15,500,000
05	Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	Rp 5,013,800
4	Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur	Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur	3 Dok	Rp 5,013,800
06	Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan	100%	Rp 160,758,000
1	Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP	3 Dok	Rp 7,280,000
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tepat waktu	1 laporan	Rp 48,078,000
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP, DPPA	7 Dok	Rp 105,400,000
07	Program : Pengembangan Sistem Informasi / Data	Persentase ketersediaan data informasi perangkat daerah	100%	Rp 33,125,000
3	Kegiatan : Penyusunan Profil SKPD	Jumlah buku profil	1 Dok	Rp 5,525,000
5	Pemutakhiran data kepegawaian	Jumlah dokumen data kepegawaian	1 Dok	Rp 27,600,000
08	Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan	100%	Rp 91,582,900
2	Kegiatan : Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan	Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan	2 Dok	Rp 91,582,900
15	Program : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan / pendampingan	100%	Rp 254,860,500
5	Kegiatan : Pelakasanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak	50 Org	Rp 46,701,500
6	Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah	Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten	2 Forum	Rp 208,159,000

KODE	PROGRAM & KEGIATAN	SASARAN	TARGET	KEBUTUHAN DANA/PAGU
16	Program : Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak	Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi	14 Kel	Rp 24,295,000
10	Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP	Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi	1 Kel	Rp 24,295,000
17	Program : Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan	Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan	100%	Rp 20,500,000
8	Kegiatan : Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan	6 Org	Rp 20,500,000
18	Program : Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender	100%	Rp 150,132,500
7	Kegiatan : Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG	Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG	1 Kel	Rp 33,757,500
8	Fasilitasi perempuan dalam pembangunan	Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan	15 Kel	Rp 116,375,000
15	Program : Keluarga Berencana	Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai	100%	Rp 2,426,217,000
2	Kegiatan : Pelayanan KIE	Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya	23 Kec	Rp 153,787,000
7	Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon	Jumlah Faskes KB yang di monitoring	29 faskes	Rp 23,400,000
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana KB/KS	20 jenis	Rp 2,249,030,000
16	Program : Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase kelompok PIK KRR yang aktif	100%	Rp 59,198,000
3	Kegiatan : Pembinaan PIK KRR	Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan	100 Org	Rp 59,198,000
17	Program : Pelayanan Kontrasepsi	Cakupan peserta KB baru	100%	Rp 72,178,000
5	Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan	Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK	9 Kec	Rp 72,178,000
18	Program : Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan peserta KB aktif	100%	Rp 54,608,000
1	Kegiatan : Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah Desa yang difasilitasi	1 desa/kel	Rp 17,080,000
2	Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB	Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes	150 Org	Rp 37,528,000
25	Program : Keluarga Sejahtera	Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera	100%	Rp 5,558,510,500
1	Kegiatan : Pelaksanaan HARGANAS	Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional	4 Kel	Rp 110,078,000
2	Pembinaan Kelompok UPPKS	Jumlah Pembinaan Kelompok UPPKS	1 Kali	Rp 25,402,000
3	Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)	Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL	1 Kali	Rp 614,953,000
4	Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP	Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba	700 Org	Rp 4,653,104,000
5	Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga	Jumlah Profil KKBPK yang dibuat	1 Profil	Rp 154,973,500
				Rp 10,830,801,205



Kepala Dinas
dr. I WAYAN SUARTIKA, ME
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19641002 199003 1 006